

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah pada tingkat desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa untuk mengelola dan mengembangkan wilayahnya secara mandiri. Pemerintah pusat dan daerah bertindak sebagai fasilitator, memberikan bantuan dana, serta melakukan pembinaan untuk mendukung pembangunan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa harus mengutamakan sinergi di antara aparat desa serta memahami kewenangan masing-masing agar dapat menjalankan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Nurhazizal et al.,( 2019).

Kinerja pemerintah desa dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dan efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti memberikan pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana pemerintah desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efisien, efektif, dan akuntabel. Namun, tantangan seperti kurangnya kompetensi aparat desa, lemahnya komitmen organisasi, dan rendahnya transparansi seringkali menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Selain itu, Banyak ditemukan kritik terhadap kinerja pemerintah desa. Lambannya kinerja aparat desa dalam mengurus keperluan administrasi cenderung melelahkan & dinilai kurang efektif, efisien serta ekonomis. Pelayanan

yang baik sangat diharapkan oleh masyarakat di desa, namun pada kenyataannya pelayanan yang diberikan masih jauh dari memuaskan, khususnya pelayanan dalam pembuatan surat-menyurat. Masyarakat desa sering tidak dilayani dengan baik & sulit menemui kepala desa Nurhazizal et al., (2019).

Permasalahan yang pernah terjadi, adanya pemotongan, penyimpangan, masalah administratif (birokrasi penyaluran dana yang berbelit, tidak lengkapnya dokumen yang disyaratkan, kurangnya pengetahuan aparat desa, kurangnya pendampingan & kualitas pendamping, serta minimnya pengawasan) Lengkong & Tasik, (2018). ICW menuliskan teridentifikasi tujuh bentuk korupsi pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran & suap Ash-shidiqq & Wibisono, (2018). Fenomena ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa dan sistem pengelolaan yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan efektif.

Secara umum, kinerja pemerintah desa di Kecamatan Ranah Batahan dipengaruhi oleh kemampuannya dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi program pembangunan desa. Namun, tidak semua faktor eksternal dan internal dapat secara langsung meningkatkan kinerja. Faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan dana desa dilakukan, karena dana desa yang besar, jika tidak dikelola dengan baik, tidak akan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara aparat desa dan masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Kompetensi aparat desa memainkan peran penting dalam menentukan kinerja pemerintah desa. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan implementasi program pembangunan. Aparat desa yang kompeten dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa secara signifikan memengaruhi kinerja pemerintah desa Sari et al.,(2020). Namun, beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Kumalasari & Widajantie (2022), menyatakan bahwa pengaruh kompetensi terhadap kinerja pemerintah desa tidak selalu signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami hubungan antara kompetensi aparat desa dan kinerja pemerintah desa.

Komitmen organisasi adalah faktor lain yang memengaruhi kinerja pemerintah desa. Komitmen ini mencerminkan sejauh mana aparat desa memiliki dedikasi terhadap tujuan organisasi, yang tercermin dalam loyalitas, motivasi, dan usaha mereka untuk mencapai sasaran organisasi. Aparat desa dengan komitmen yang tinggi cenderung bekerja lebih efektif dan efisien, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Penelitian oleh Rulyanti et al.,(2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, Pratama et al., (2022) berpendapat bahwa pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja tidak selalu signifikan, tergantung pada kondisi organisasi dan faktor-faktor lainnya.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana

desa, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong partisipasi dalam pembangunan desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak positif pada kinerja pemerintah desa Solihat et al.,(2018). Namun, penelitian oleh Kholifah (2020) menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, terutama jika masyarakat tidak menggunakan informasi yang tersedia untuk berpartisipasi aktif.

Kinerja Pemerintah Desa dengan faktor diatas masih harus diperkuat dengan adanya Pengelolaan Dana Desa yang baik (kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, & pertanggungjawaban). Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting dilaksanakan oleh aparat desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan lebih transparan, akuntabel, & partisipatif serta sesuai peraturan yang berlaku. Semakin baik & berkualitasnya aparat desa, komitmen organisasi, & transparansi, maka akan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa. Dengan meningkatkan Pengelolaan Dana Desa maka kinerja pemerintah desa juga semakin optimal Sari et al., (2020).

Pengelolaan dana desa merupakan elemen kunci yang menjadi jembatan antara kompetensi, komitmen, dan transparansi dengan kinerja pemerintah desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan yang baik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya memerlukan manajemen yang profesional agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian

Sugeng (2014) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa. Apabila pengelolaan keuangan Desa dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Desa khususnya pada sektor pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan Desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah Desa yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Ketika pengelolaan dana dilakukan dengan baik, pemerintah desa dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Pengelolaan dana desa menjadi variabel mediasi yang penting karena menghubungkan faktor-faktor seperti kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, dan transparansi dengan kinerja pemerintah desa. Kompetensi aparat desa yang baik mendukung pengelolaan dana secara lebih efektif, sementara komitmen organisasi dan transparansi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana tersebut. Sebaliknya, pengelolaan dana yang buruk dapat menghambat peningkatan kinerja meskipun faktor-faktor lainnya sudah memadai. Dengan demikian, pengelolaan dana desa berfungsi sebagai katalis yang memastikan bahwa potensi dari kompetensi, komitmen, dan transparansi dapat diwujudkan dalam bentuk kinerja pemerintah desa yang lebih baik. Riset ini bertujuan menguji kembali variabel Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi & Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa, objek penelitian Aparat Desa Kecamatan Ranah Batahan..

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Anton et al., (2023) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dimediasi oleh Pengelola Dana Desa, dengan mengambil variabel Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi sebagai variabel independen, Pengelolaan Dana Desa sebagai variabel mediasi dan Kinerja Pemerintah Desa sebagai variabel dependen. Tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Tempat dan waktu penelitian dilakukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, dan transparansi merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja pemerintah desa. Namun, pengaruh tersebut tidak langsung, melainkan dimediasi oleh pengelolaan dana desa. Dengan pengelolaan dana yang baik, pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali hubungan tersebut dengan fokus pada Kecamatan Ranah Batahan, mengingat relevansinya dengan isu terkini terkait pengelolaan dana desa dan upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Desa Yang Dimediasi Oleh Pengelola Dana Desa di Kecamatan Ranah Batahan**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Perintah Desa?
4. Apakah Pengelolaan Dana Desa Meediasi Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Kinerja Pemerintahan Desa?
5. Apakah Pengelolaan Dana Desa Memediasi Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kinerja Pemerintah Desa?
6. Apakah Pengelola Dana Desa Memediasi pengaruh Transparansi dan Kinerja Pemerintah desa?
7. Apakah Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh dan Kinerja Pemerintah Desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikiut:

1. Untuk memberikan bukti bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
2. Untuk memberikan bukti bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
3. Untuki memberikan bukti bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

4. Untuk memberikan bukti bahwa Pengelolaan Dana Desa Memediasi berpengaruh terhadap Kompetensi Aparat Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
5. Untuk memberikan bukti bahwa Pengelolaan Dana Desa Memediasi Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
6. Untuk memberikan bukti bahwa Pengelola Dana Desa Memediasi Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa.
7. Untuk memberikan bukti bahwa Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan peningkatan kinerja di tingkat pemerintah desa.

2. Secara peraktis

menjadi acuan bagi pemerintah desa di Kecamatan Ranah Batahan dalam mengoptimalkan kinerja dalam pencapaian program pembangunan desa dan pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan transparan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan di tingkat desa untuk memahami faktor-faktor penting yang memengaruhi kinerja pemerintah desa, sehingga dapat menyusun

strategi dan kebijakan yang lebih tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **1.1 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal tugas akhir adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang yang memuat fenomena serta alasan dalam pengambilan jurnal penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dijadikan sebagai focus penelitian berdasarkan penjelasan latar belakang, serta tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

merupakan tinjauan teoritis yang berisikan tentang landasan teori dan kajian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

merupakan metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang berisikan tentang gambaran umum penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan penelitian dilakukan dengan menggunakan kajian-kajian terdahulu, landasan teori dan memperhatikan kondisi pada saat penelitian.

## BAB V : PENUTUP

merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari uraian dan pembahasan hasil penelitian, saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kajian lanjutan pada topik atau bidang yang sama, serta beberapa keterbatasan penulis dalam penelitian.